



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONI HERMAN BAZA
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 854721

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 15.575.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 660 m2/131 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 15.575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 446.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI KAZE R Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. MOTOR, YADEA E8S PRO AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOTOR, KEEWAY BENDA KP 250 VB M/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. MOTOR, YAMAHA BLS A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.067.959

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 16.109.217.959



III. HUTANG

Rp. 54.316.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 16.054.901.959

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.